

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI BANJIR BANDANG DI KECAMATAN TANGSE KABUPATEN PIDIE

TEUKU ADIL DERMAWANSYAH⁽¹⁾ ZULFIKAR⁽²⁾ AWALUDDIN⁽³⁾

Ilmu Administrasi, Universitas Jabal Ghafur^(1.2.3)

adilteuku8@gmail.com, zulfikar@unigha.ac.id, awalpidie1@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the performance of BPBD and analyze the challenges that occur in the field when a disaster occurs. This study uses a qualitative approach. Researchers found that floods are short-lived flood events caused by heavy rainfall. This increases the river water level because the river water discharge increases. Carrying out horizontal coordination with agencies and service agencies before and after a BPBD disaster. This research shows that the Pidie Regency BPBD is the spearhead of the city government in providing disaster emergency services to the community and government. Because BPBD has done its job well when a disaster occurs, BPBD should maintain its performance when facing flash floods, earthquakes and other disasters. At the pre-disaster, emergency response and post-disaster stages, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) collaborates with agencies and service agencies horizontally.

Keywords : Management, Disaster, Regional, Flash Flood

ASBTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja BPBD dan menganalisis tantangan yang terjadi di lapangan saat bencana terjadi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menemukan bahwa banjir adalah kejadian banjir yang singkat yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Ini meningkatkan muka air sungai karena debit air sungai meningkat. Melakukan koordinasi horizontal dengan instansi dan lembaga dinas sebelum dan sesudah bencana BPBD. Penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Pidie adalah ujung tombak pemerintah kota dalam memberikan layanan darurat bencana kepada masyarakat dan pemerintah. Karena BPBD telah melakukan tugas dengan baik saat terjadi bencana, seharusnya BPBD mempertahankan kinerjanya saat menghadapi banjir bandang, gempa, dan bencana lainnya dan Pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja sama dengan instansi dan lembaga dinas secara horizontal.

Kata Kunci: Penanggulangan, Bencana, Daerah, Banjir Bandang

1. PENDAHULUAN

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk oleh Peraturan Presiden NO. 8 tahun 2008 dan bertanggung jawab atas masalah kebencanaan sebelum, saat, dan setelah bencana. Untuk menanggulangi bencana di Indonesia, pemerintah daerah yang diberi otonomi harus memulai meningkatkan kemampuan mereka untuk menangani bencana secara mandiri.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Kabupaten Pidie terletak di provinsi Aceh, yang sering kali menghadapi berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

Banjir bandang merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pidie. Kecamatan Tangse di Kabupaten Pidie merupakan salah satu daerah yang rawan terkena banjir bandang karena faktor geografisnya, seperti lokasi yang berada di lereng pegunungan atau dekat dengan Sungai besar. Banjir bandang dapat menyebabkan kerugian besar baik dalam bentuk kerugian materiil maupun korban jiwa.

Dalam rangka menangani bencana banjir bandang, pemerintah daerah memiliki peran penting melalui lembaga yang ditugaskan untuk mengatasi bencana, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana secara terpadu dan koordinatif, termasuk dalam menangani banjir bandang.

Namun, dalam pelaksanaannya, kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi banjir bandang di Kecamatan Tangse

Kabupaten Pidie bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat koordinasi dengan instansi terkait, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dan pemahaman terhadap risiko bencana di masyarakat.

Peneliti merumuskan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja dari badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat kinerja badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten pidie. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten pidie disaat terjadinya bencana, dan untuk menganalisis hambatan yang akan terjadi di lapangan di saat bencana tersebut terjadi.

Pemerintahan yang baik adalah yang responsif terhadap berbagai masalah dan proaktif dalam menangani masalah. Pada dasarnya, setiap organisasi didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Kinerja yang baik dalam pelaksanaan tujuan diperlukan untuk mencapainya. Seberapa besar pencapaian suatu organisasi adalah representasi dari kinerja organisasi tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia NO. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, konsep kota tangguh (resilient city) di Indonesia bertujuan untuk menciptakan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan melindungi fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh pemanfaatan ruang.

Setiap provinsi dan kabupaten/kota harus membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya, seperti :

1. Badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
2. Badan pada tingkat Kabupaten/Kota di pimpin oleh seorang pejabat dibawah Bupati/Walikota atau setingkat eselon Ila.

Adapun tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, pada setiap tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
2. Memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk :
 - a. Mengintegrasikan pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 - b. Menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana.
3. Melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana melalui :
 - a. Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan resiko bencana di wilayahnya
 - b. Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana

- c. Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana

Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi

4. Melaksanakan tanggap darurat secara cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana yang meliputi:

- a. Pangan
- b. Pelayanan kesehatan
- c. Kebutuhan air bersih dan sanitasi
- d. Sandang
- e. Penampungan dan tempat hunian sementara
- f. Pelayanan psiko-sosial

5. Memulihkan dan meningkatkan secara lebih baik:

- a. Kehidupan sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana
- c. Dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan sumberdaya untuk penanggulangan bencana, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat.

Dalam penanggulangan dampak bencana, tindakan penanggulangan dan pemulihan dilakukan melalui pendekatan integral dan terpadu yang terdiri dari tiga tahapan: tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Tahap ini bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi bangunan ibadah, bangunan sekolah, infrastruktur

sosial dasar, serta prasaran dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan.

Tahap ini bertujuan membangun kembali daerah bencana dengan melibatkan semua masyarakat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Pembangunan sarana dan prasarana haruslah dimulai dari sejak selesainya penyesuaian tata ruang (apabila diperlukan) di tingkat kabupaten terutama di wilayah rawan gempa (daerah patahan aktif).

Penyebab utama terjadinya banjir bandang adalah curah hujan yang tinggi, kondisi topografi yang curam dan berkurangnya vegetasi di lokasi tersebut (Mahmood et al., 2016). Banjir bandang merupakan bencana iklim yang tidak dapat diprediksi dibandingkan dengan banjir sungai yang terjadi karena meningkatnya luapan air sungai. Banjir bandang terjadi secara tiba-tiba dan mendadak, pergerakannya begitu cepat dan mengganas, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa karena ketidaksiapan menghadapinya terutama bila terjadi di waktu malam hari (Rahman et al., 2016).

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata '*policy*' yang berasal dari bahasa Inggris, berarti sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. sebagai kebijakan publik, kebijakan komunikasi harus dirumuskan oleh lembaga pemerintah. Ini sesuai dengan pendapat James E. Anderson (dalam Islamy, 2002) yang mengatakan bahwa "*public policies are those policies are developed by governmental bodies and officials.*" Kebijakan publik didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan secara terencana dan terukur yang dilakukan pihak pemerintah dengan banyak pihak diberbagai bidang yang telah ditetapkan. Sehingga kegunaan dari kebijakan publik dibutuhkan pada aktivitas sosialisasi dan evaluasi kebijakan

2. METODELOGI

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif penelitian deskriptif untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran yang tidak bias tentang keadaan sebenarnya dari subjek penelitian. Dan Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., dengan mendeskripsikannya dengan kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah dengan menggunakan metode alamiah.

Menurut Narbuko dan Achmadi (2012:54), penelitian metode deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang berusaha untuk menjelaskan pemecahan masalah saat ini berdasarkan data-data. Metode deskriptif juga komperatif dan korelatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk memahami bagaimana BPBD berfungsi dalam penanggulangan banjir bandang di kecamatan Tangse, kabupaten Pide.

3. PEMBAHASAN

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi dan

4. KESIMPULAN

Menurut Stephen Robbins, yang diterjemahkan oleh Harbani Pasolong Kinerja, kinerja adalah hasil evaluasi kinerja karyawan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses banjir bandang, peristiwa longsor adalah peristiwa pertama yang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi, dan banjir bandang adalah peristiwa berikutnya, yang merupakan konsekuensi dari bencana longsor sebelumnya. Bendungan alami yang terbentuk akibat

longsor tanah dari lereng sungai merupakan penyebab utama banjir bandang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan koordinasi dengan instansi/Lembaga dinas secara horizontal pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Selain itu di dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Penanggulangan Bencana dinyatakan pula bahwa untuk menanggulangi bencana dilakukan koordinasi eksternal antar instansi terkait dalam beberapa sektor yaitu sektor pemerintahan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, energi dan sumber daya air, perhubungan, tenaga kerja dan transmigrasi, keuangan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, polri dan tni.

Hasil studi rehabilitasi dan rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan, "Secara struktur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak memiliki alat kerja, ada kewenangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)." Namun, dia menambahkan, "tapi disaat terjadinya bencana, alat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah alat milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) karena pemerintah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sifatnya koordinasi setiap bencana yang bertanggung jawab mutlak ialah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tapi kebutuhan alat dan personil semua teknis yang bertanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Salah satu fungsi manajemen yang sangat terkait dengan fungsi lainnya adalah koordinasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, koordinasi sangat penting karena dapat mengarahkan semua tindakan dan membantu mencapainya. Organisasi dapat berjalan dengan baik jika semua orang bekerja sama. Jika tidak ada koordinasi, individu dan unit yang ada akan

kehilangan kontrol atas peran mereka. Istilah "koordinasi" berasal dari dua kata asing: "cum", yang berarti berbeda, dan "ordinate", yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu yang penting.

Dalam peraturan bupati NO 32 tahun 2017 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdapat beberapa kebijakan dari badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggapi prabencana, bencana, dan pasca bencana tersebut yaitu :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, pembinaan dan pelayanan administrasi, penataan dokumentasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, aset, perlengkapan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.

Adapun fungsi dari sekretariat tersebut adalah:

- 1) fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi unsur pengarah
- 2) pengumpulan data dan informasi kebencanaan
- 3) pengkoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan

b. bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran

Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran atau peringatan dini pada saat prabencana serta pemberdaya masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dan mencegah ancaman bahaya kebakaran serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Adapun fungsi dari bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemadam kebakaran adalah:

- 1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, Pemadam Kebakaran dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana
- 2) penyusunan tata ruang kawasan potensi bencana
- 3) pelaksanaan pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, Pemadam Kebakaran dan peringatan dini serta pemberdayaan masyarakat

c. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan dan pengurusan pengungsi, serta pemulihan segera sarana dan prasarana

Adapun fungsi dari bidang kedaruratan dan logistik adalah:

- 1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
- 2) pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
- 3) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan dan pengurusan

pengungsi, serta pemulihan segera sarana dan prasarana

d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun fungsi dari rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :

- 1) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pasca bencana
- 2) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pasca bencana
- 3) pelaksanaan penyusunan program/perencanaan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Bencana di Kecamatan Tangse menemukan bahwa beberapa kendala menghambat pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, termasuk kurangnya koordinasi antar pihak terkait, sumber daya manusia (SDM) yang buruk, kurangnya dana, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bencana. Namun demikian, secara umum, upaya pencegahan bencana di Tangse terus dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan BNPB, dengan partisipasi komunitas lokal seperti LSM, pemerintah Gampong, dan tokoh-tokoh setempat dan mengatasi bencana dengan indikator keberhasilan dapat dilihat dari bagaimana tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk membuat program penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan indikator pengurangan resiko bencana (PRB) dari penyelenggaraan. Dalam penanggulangan bencana karhutla, organisasi ini berusaha mencapai tujuan dan sasaran melalui

kinerja yang telah dicapai, bekerja sama dengan lembaga terkait, dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan dan relawan.

3. KESIMPULAN

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi banjir bandang di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat koordinasi dengan instansi terkait, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dan pemahaman terhadap risiko bencana di Masyarakat Pemerintahan yang baik adalah yang responsif terhadap berbagai masalah dan proaktif dalam menangani masalah. Pada dasarnya, setiap organisasi didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Kinerja yang baik dalam pelaksanaan tujuan diperlukan untuk mencapainya. Seberapa besar pencapaian suatu organisasi adalah representasi dari kinerja organisasi tersebut.

Dalam penanggulangan bencana di kabupaten pidie Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dinas secara horizontal pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Awusi, B. A., Nayoan, H., & Tompodung, J. (2018). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Hilman Imtiyaz, Andi. 2016. *Analisis Nomor P-IRT Pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*, Universitas Jember
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga.
- J, Salusu. 2003. *Pengambilan Keputusan Strategik*, Jakarta : PT Gramedia WidiaSarana Indonesia.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian pendidikan :kompetensi dan*
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung :Alfabeta.
- J. Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :Remaja Rosdakarya, jalal, Fasli dan DediSupriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Kimbal. R.W. 2015. *Modal Sosial Dan Ekonomi Industri Kecil :Sebuah Studi Kualitatif*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish.
- Mahmood, S., Khan, A. U. H., & Mayo, S. M. (2016). Exploring underlying causes and assessing damages of 2010 flash flood in the upper zone of Panjkora River. *Natural Hazards*, 83, 1213-1227
- Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahman, M. T., Aldosary, A. S., Nahiduzzaman, K. M., & Reza, I. (2016). Vulnerability of flash flooding in Riyadh, Saudi Arabia. *Natural Hazards*, 84, 1807-1830.
- Seno Adi. 2013. *Karakterisasi Bencana Banjir Bandang di Indonesia*. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia* Vol. 15. No. 1. Hlm.42-51
- Yanti, F. (2014). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam Pelaksanaan Program Tanggap Darurat untuk Penanganan Bencana di Kecamatan*
- Siagian, S.P. 2002. *Pelabelan pangan*.

- Medan: universitas Sumatera Usaha.
- Silaen, Sofar. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor: In Media.
- Wheelen .Thomas dan Hunger. David.1989.*Strategic Managemen And Public Policy*. USA.Addison
- Wheeelen. Thomas.Dan Hunger. David.2003 *Manajemen Strategi* Yogyakarta.Andi Publisher.
- Zulfikar, Z., & Suriadi, M. (2020). Strategy of Department of Industry and Cooperation of Pidie Jaya District in Developing Small and Medium Micro Enterprises. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(3), 2458-2464.
- Zulfikar, Z. (2021, January). STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Jabal Ghafur* (Vol. 1, pp. 433-439).